

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAHAN TAHUN 2024



**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
KOTA PALANGKA RAYA**



PEMERINTAH KOTA PALANGKA RAYA
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Jalan Tjilik Riwut No. 98 Palangka Raya
Telpon (0536) 3231542/Fax. (0536) 3231539

E-mail : bappeda@palangkaraya.go.id/[Website](http://bappeda.palangkaraya.go.id) : <http://bappeda.palangkaraya.go.id>

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA

NOMOR : 289/Set/Bapplitbang/I/2025

TENTANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)
BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan bentuk tanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dalam penggunaan anggaran, maka perlu disusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, perlu ditetapkan Keputusan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kota Praja Palangka Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2753);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur, perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 89 Tahun 2021 tentang Perjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya (Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 2 Tahun 2019 Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023;
13. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2019 Nomor 17), sebagaimana telah diubah Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 15 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023 di Lingkungan Pemerintah Kota Palangka Raya (Berita Daerah Kota Palangka Raya Tahun 2020 Nomor 14);
14. Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor : 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2024.
- KESATU : Tujuan Pelaporan Kinerja memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dicapai serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya;
- KEDUA : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja;
- KETIGA : Penyusunan Laporan kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran yang dilakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 24 Januari 2024

KEPALA BAPPEDALITBANG
KOTA PALANGKA RAYA,



Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750317 199903 1 005

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas kehadiran Allah SWT, karena atas karena atas perkenan-Nya telah tersusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024. Pembuatan LKIP merupakan penerapan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan ini disusun mengacu pada Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026. Laporan LKIP memuat pencapaian kinerja sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Palangka Raya sebagai bentuk peran serta aktif dalam rangka mewujudkan *good governance*.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga tersusunnya LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024, semoga bermanfaat dan berguna untuk pelaksanaan tugas dan sebagai acuan penyempurnaan laporan kinerja pada tahun berikutnya.

Palangka Raya, 24 Januari 2024

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,



Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750317 199903 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan laporan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya selama Tahun 2024, Capaian Kinerja Tahun 2024 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024 dialokasikan anggaran Rp. 19.494.772.155 realisasi sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp. 18.381.683.720 atau 94,29% yang dijabarkan ke dalam 4 Program dan 18 Kegiatan.

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis realisasi kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah realisasi sebesar 111,11%.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD realisasi sebesar 111,11%.
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah sebesar 111,79%.
4. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbang realisasi sebesar 100%.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan realisasi sebesar BB.

Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis terhadap sasaran strategis dan indikator, pencapaian sasaran kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya menunjukkan hasil yang memuaskan dengan nilai sebesar 108,50%.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	vi

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Sumber Daya Manusia	13
1.4. Sarana dan Prasarana	14
1.5. Isu Strategis	15
1.6. Sistematika Penulisan	15

BAB II PERENCANAAN KINERJA	17
2.1. Perencanaan Strategis.....	17
2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)	18
2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)	20
2.4. Rencana Aksi	32
2.5. Perjanjian Kinerja	43

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	51
A. Capaian Indikator Kinerja	52
A.1. Capaian Tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	52
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	52
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD	53
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	53
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	54
A.1.1. Capaian Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	55
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	55
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	56

3.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD	56
4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	57
5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	57
A.1.2.	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	59
1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	59
2.	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	59
3.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD	60
4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	60
5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	60
A.1.3.	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD.....	62
1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	62
2.	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	63
3.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD	63
4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	64
5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	64
A.1.4.	Capaian Sasaran Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	66
1.	Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	66
2.	Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	66
3.	Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD	67
4.	Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	67
5.	Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	67

A.1.5. Capaian Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	69
1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini	69
2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir	69
3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD	70
4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional	70
5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan	70
B. Analisis Atas Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya	78
C. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja	95
D. Realisasi Anggaran	108
BAB IV PENUTUP	122

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1.	IKU Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024	19
Tabel	2.2.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OP	19
Tabel	2.3.	Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024	20
Tabel	2.4.	Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024	32
Tabel	2.5.	Sasaran, Indikator dan Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024	46
Tabel	3.1.	Skala Nilai Peringkat Kinerja	51
Tabel	3.2.	Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024	78
Tabel	3.3.	Penghitungan Efisiensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	82
Tabel	3.4.	Realisasi Anggaran Tahun 2024	109

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah mewajibkan setiap instansi pemerintah dan unit kerja untuk menyusun laporan kinerjanya sebagai wujud pertanggungjawaban atas segala tugas dan kewajibannya. Perbaikan tata kelola pemerintahan merupakan agenda penting dalam reformasi pemerintahan yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Sistem pemerintahan yang berfokus pada peningkatan kinerja berorientasi pada hasil (*outcome*) dikenal sebagai Sistem Kinerja Instansi Pemerintah yang diimplementasikan oleh masing-masing instansi pemerintah, hal ini berarti instansi pemerintah merencanakan sendiri, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerjanya sendiri serta melaporkan kepada instansi yang lebih tinggi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya merupakan subsistem dari sistem penyelenggaraan Pemerintah Kota Palangka Raya yang memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah baik mulai tahap perencanaan daerah, pengorganisasian, pelaksanaan hingga evaluasi. Indikator keluaran (*output*) yang dihasilkan adalah berupa dokumen perencanaan pembangunan daerah yang disusun melalui rangkaian proses perencanaan sesuai dengan kebutuhan publik, kemampuan daerah serta pemberdayaan dan pengembangan potensi daerah serta dokumen sektor lainnya seperti ekonomi, sosial, infrastruktur dan sebagainya.

Penyusunan LKIP Tahun 2024 disusun sebagai pertanggungjawaban atas rencana kerja tingkat Perangkat Daerah yang didanai dari APBD yang berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana yang ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran tersebut berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Renstra tahun berkenaan, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas berhasil tidaknya pencapaian target kinerja sehingga LKIP Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024 ini dapat menjadi acuan bagi pencapaian target kinerja di tahun berikutnya.

1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palangka Raya Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Palangka Raya, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya menjalankan fungsi penunjang urusan Pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dengan tugas pokok penyusunan dan perumusan kebijakan teknis perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas dukungan teknis perencanaan pembangunan daerah, pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintah daerah tugas lingkup perencanaan pembangunan daerah, pelaksanaan tugas lain yang diberikan Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya, pengkoordinasian penyusunan perencanaan dan kerjasama pembangunan daerah dan pemantauan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kegiatan badan.

Dalam melaksanakan tugas pokok Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, pemerintahan dan pembangunan manusia, perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, penelitian dan pengembangan; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya berdasarkan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 61 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, dibagi dalam 1 (satu) sekretariat dan 4 (empat) bidang pelayanan teknis sebagai berikut :

1. Kepala Badan;
2. Sekretariat yang membawahkan :
 - a. Sub Bagian Keuangan dan Aset
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan;
4. Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur, dan Kewilayahan;
5. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan;
7. Kelompok Jabatan Fungsional dan;
8. Kelompok Jabatan Pelaksana.

Dengan uraian tugas dan fungsi sebagai berikut :

1. Kepala Badan

- a. Menetapkan perencanaan dan penyusunan kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan dan menyelenggarakan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan dibidang perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan berdasarkan pedoman dan ketentuan yang berlaku;
- b. Menyelenggarakan, mengatur dan mengarahkan kegiatan sekretaris dan para kepala bidang di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya dalam sinkronisasi pelaksanaan tugas sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan membina kegiatan administrasi, organisasi dan tatalaksana Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sesuai petunjuk dan ketentuan agar mencapai hasil yang optimal;

- c. Menetapkan dan mengevaluasi perkembangan penyelenggaraan Program dan kegiatan untuk menentukan skala prioritas program dan kegiatan tahunan serta melaksanakan pengendalian administrasi pembangunan yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Palangka Raya, Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan Sumber Dana lainnya, serta melaksanakan monitoring, analisa dan evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah berdasarkan pedoman dan Peraturan Perundang-Undangan;
- d. Menyelenggarakan, memfasilitasi, mengkoordinasikan pengkajian dan perumusan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) serta mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- e. Menyelenggarakan Musyawarah Rencana Pembangunan (MUSRENBANG) Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD);
- f. Menyelenggarakan koordinasi dengan instansi terkait untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan meneliti surat-surat masuk/keluar, nota dinas, nota pertimbangan, serta arah disposisi yang baik kepada pimpinan maupun bawahan sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- g. Menetapkan penilaian Prestasi Kerja Bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- h. Menetapkan laporan pelaksanaan kegiatan di lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sebagai bahan bagi pimpinan; dan
- i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

2. Sekretaris Badan

- a. Mengkoordinasikan kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah;
- b. Mengkoordinasikan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;

- c. Membina dan memberi dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- d. Mengkoordinir dan memberi dukungan administrasi keuangan, perencanaan anggaran dan penyiapan dana serta pertanggungjawaban keuangan;
- e. Membina dan menata organisasi dan tata laksana;
- f. Merumuskan penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara/daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan;
- g. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Kerja (RENJA), Rencana Strategis (RENSTRA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPPD), Penetapan Kinerja, Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan tindak lanjut LHE-LHP Inspektorat dan pengawasan lainnya di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya;
- h. Mengkoordinasikan pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik Negara;
- i. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

3. Kepala Sub Bagian Keuangan dan Aset

- a. Menyiapkan kebijakan teknis pengelolaan keuangan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- b. Mengajukan rencana kerja anggaran melalui Tim Anggaran eksekutif untuk menjadi dokumen pengguna anggaran;

- c. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan Petunjuk Pelaksanaan/Petunjuk Penulisan untuk tertibnya administrasi keuangan;
- d. Mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dengan atasan, baik lisan maupun tertulis untuk memperoleh petunjuk lebih lanjut;
- e. Menyusun Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) serta menyelenggarakan pengelolaan barang milik negara/daerah;
- f. Menyusun laporan penatausahaan Barang Milik Daerah;
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dengan para kepala sub bagian melalui pertemuan atau rapat untuk menyatukan pendapat;
- h. Menyiapkan dan memberikan penilaian kerja bawahan sebagai bahan/dokumen penilaian Sasaran Kerja Pegawai (SKP);
- i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- j. Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diperintahkan oleh atasan.

4. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

- a. Menyusun program kerja kegiatan Sub Bag Umum dan Kepegawaian sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- b. Menyusun rencana kebutuhan pegawai sesuai formasi untuk optimalisasi pelaksanaan tugas unit;
- c. Membuat usulan permintaan pegawai sesuai kebutuhan untuk kelancaran tugas unit;
- d. Menyusun dan memproses administrasi kepegawaian Usulan Kenaikan Pangkat (UKP) bagi pelaksana, Daftar Urut Kepangkatan (DUK), kenaikan gaji berkala, administrasi pensiun, surat ijin, administrasi daftar diklat perjenjangan dan fungsional PNS, merekap daftar hadir PNS sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;
- e. Menyusun dan memproses administrasi umum meliputi pengagendaan, pengaturan surat-surat/naskah yang akan ditandatangani oleh atasan, pendistribusian surat masuk dan surat keluar, pengarsipan naskah dinas/dokumen dan penomoran Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan tugas berjalan dengan lancar;

- f. Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan pengajuan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP);
- g. Menyusun laporan hasil pelaksanaan kegiatan bawahan sebagai bahan masukan bagi pimpinan; dan
- h. Melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh atasan untuk kelancaran tugas kedinasan.

5. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain yang sah;
- d. Melakukan analisa dan pengkajian Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah;
- e. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- f. Menerima dan memeriksa hasil analisis data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah Kota Palangka Raya;
- g. Merumuskan dan menyelia program-program pembangunan pemerintah pusat dan provinsi yang dilaksanakan di daerah serta penyelarasan program pembangunan di daerah dengan program pembangunan/prioritas pembangunan provinsi dan pemerintah pusat;
- h. Merumuskan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- i. Mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- j. Melakukan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan serta hasil rencana pembangunan daerah;

- k. Melakukan pengendalian melalui pemantauan, supervisi dan tindak lanjut penyimpangan terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
- l. Mengidentifikasi masalah pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
- m. Memeriksa dan menyelia hasil serta proses pengumpulan data Informasi Pembangunan Daerah;
- n. Menyelia dan mensosialisasikan penyampaian serta pengamanan data melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
- o. Memeriksa hasil penyusunan Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah;
- p. Menyelia dan mengkoordinasikan pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah;
- q. Memeriksa dan menyelia hasil analisis evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
- r. Memeriksa dan menyelia hasil evaluasi dan laporan pelaksanaan program Pembangunan Daerah;
- s. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- t. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

6. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain
- d. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- e. Mengkoordinasikan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

- f. Merancang pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- h. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- i. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga di dan kabupaten/kota;
- j. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional
- k. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- l. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- m. Mengkoordinir laporan pelaksanaan tugas Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagai bahan masukan bagi pimpinan;
- n. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

7. Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain;
- d. Mengkoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, (RPJPD), (RPJMD), dan (RKPD);

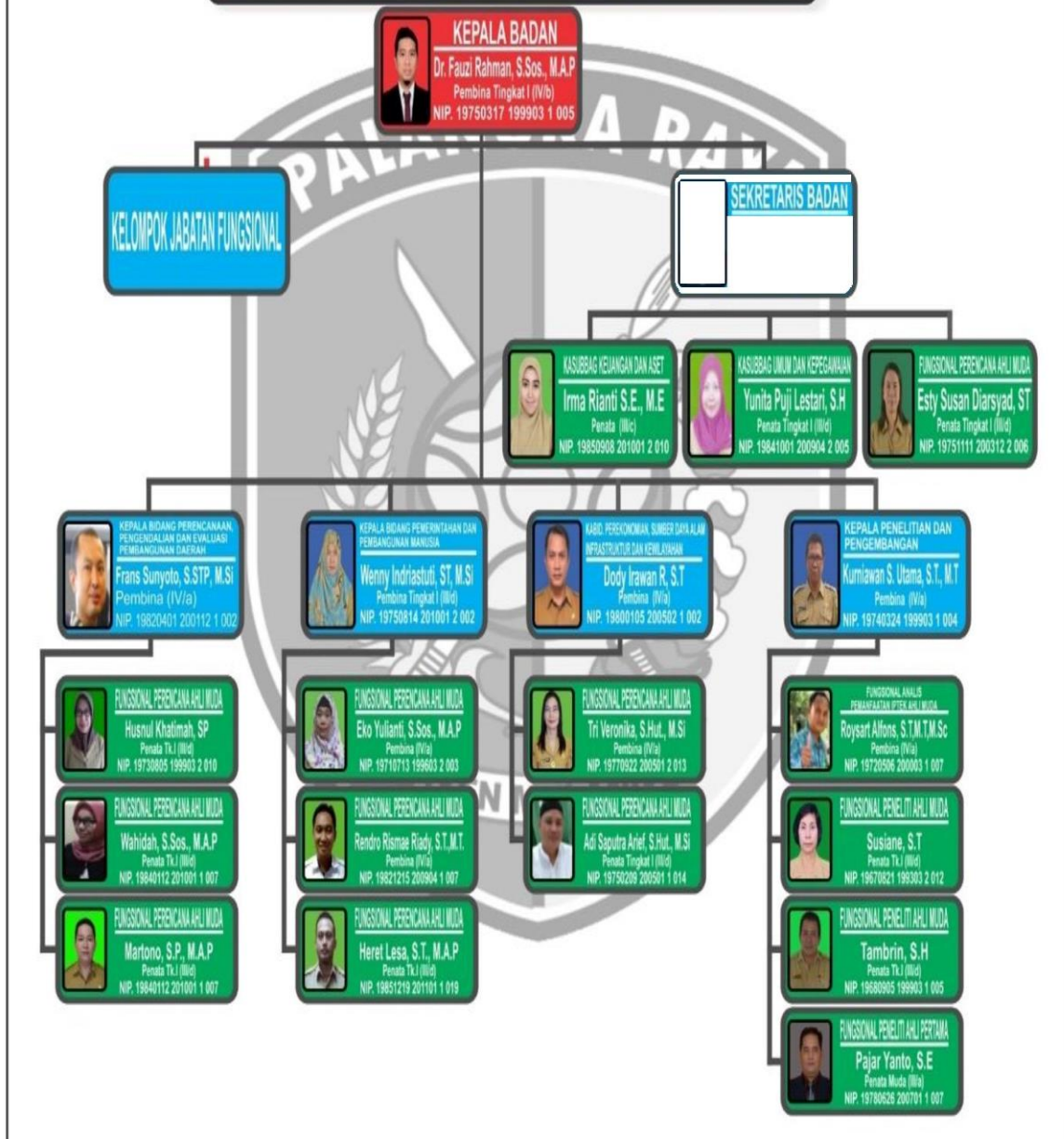
- e. Mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah dan rencana kerja Perangkat Daerah;
- f. Mengkoordinasikan pelaksanaan musyawaran perencanaan pembangunan, rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- g. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD);
- h. Mengkoordinasikan Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota (RTRWK) serta mengkoordinasikan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kota Palangka Raya sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- i. Mengkoordinasikan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota;
- j. Mengkoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan kementerian/lembaga di dan kabupaten/kota;
- k. Mengkoordinasikan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional;
- l. Mengkoordinasikan pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar daerah;
- m. Mengkoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah kabupaten/kota;
- n. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- o. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

8. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan

- a. Merumuskan program, kegiatan dan anggaran pada Bidang Penelitian dan Pengembangan berdasarkan kebijakan dan arahan dari Kepala Badan;
- b. Mendisposisikan bahan kerja dan memberikan petunjuk kepada bawahan;
- c. Memeriksa dan memberi paraf draf surat keputusan dan dokumen lain;
- d. Menyusun kebijakan teknis atau kerangka acuan kerja Penelitian dan Pengembangan;
- e. Menyusun perencanaan program dan anggaran penelitian dan pengembangan pemerintahan;
- f. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi bahan terkait proposal Penelitian dan Pengembangan;
- g. Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang Penelitian dan Pengembangan;
- h. Melaksanakan seminar awal dan seminar akhir kegiatan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi pelaksanaan inovasi daerah;
- i. Melaksanakan pengkajian kebijakan lingkup penelitian dan pengembangan;
- j. Memantau pengelolaan data kelitbangan, peraturan dan pelaksanaan pengkajian peraturan, serta koordinasi dan pelaksanaan diseminasi kelitbangan;
- k. Memantau, mengevaluasi dan melaporkan atas pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- l. Mengkoordinasikan dan menyinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan di Bidang Penelitian dan Pengembangan;
- m. Melaksanakan penataan dan publikasi hasil-hasil kelitbangan di bidang penelitian dan pengembangan;
- n. Melaksanakan administrasi penelitian dan pengembangan daerah;
- o. Merumuskan, memeriksa dan menetapkan penilaian kerja bawahan berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan/dokumen Sasaran Kerja Pegawai (SKP); dan
- p. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugas.

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA LITBANG KOTA PALANGKA RAYA

(PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA NO. 61 TAHUN 2021)



1.3. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sampai dengan 31 Desember 2024 berjumlah 46 orang.

1. Jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan terakhir adalah sebagai berikut :
 - a. Pendidikan S-3 sebanyak 1 (Satu) orang
 - b. Pendidikan S-2 sebanyak 14 (Empat Belas) orang
 - c. Pendidikan S-1 sebanyak 28 (Dua Puluh Delapan) orang
 - d. Pendidikan D-III sebanyak 2 (Dua) orang
 - e. Pendidikan SLTA sebanyak 1 (Satu) orang
2. Jumlah pegawai berdasarkan jabatan adalah sebagai berikut :
 - a. Struktural
 - 1) Eselon II.b : 1 orang
 - 2) Eselon III.a : 1 orang
 - 3) Eselon III.b : 4 orang
 - 4) Eselon IV.a : 2 orang
 - b. Pelaksana : 26 orang
 - c. Pejabat Fungsional : 12 orang
3. Jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan adalah sebagai berikut :
 - a. Pembina Tingkat I (IV/c) : 1 orang
 - b. Pembina Tingkat I (IV/b) : - orang
 - c. Pembina (IV/a) : 9 orang
 - d. Penata Tingkat I (III/d) : 19 orang
 - e. Penata (III/c) : 5 orang
 - f. Penata Muda Tingkat I (III/b) : 9 orang
 - g. Penata Muda (III/a) : 2 orang
 - h. Pengatur Tingkat I (II/d) : 1 orang
 - i. Pengatur (II/c) : - orang
 - j. - / IX : 4 orang

1.4. Sarana dan Prasarana

Sebagai penunjang pelaksanaan tugas dan fungsi, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya memiliki sarana prasarana sampai dengan 31 Desember 2024 yaitu :

1. Gedung Kantor	: 1 unit
2. Mobil Dinas	: 9 unit
3. Motor Dinas	: 7 unit
4. Komputer PC	: 55 unit
5. Lap Top	: 50 unit
6. Note Book	: 72 unit
7. Printer	: 66 unit
8. Scanner	: 5 unit
9. Hard Disk Eksternal	: 60 unit
10. Mesik Ketik	: 13 unit
11. Lemari Besi	: 9 unit
12. Filling Besi	: 61 unit
13. Lemari Kaca	: 16 unit
14. Lemari Kayu	: 6 unit
15. Rak Kayu	: 17 unit
16. Meja Rapat	: 31 unit
17. Meja Tulis	: 66 unit
18. Meja Biro	: 19 unit
19. Kursi Rapat	: 180 unit
20. Kursi Tangan	: 53 unit
21. Kursi Biasa	: 21 unit
22. AC	: 76 unit
23. Televisi	: 15 unit
24. Loudspeaker	: 9 unit
25. Unit Power Supply	: 18 unit
26. CCTV	: 15 titik

1.5. Isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Bappedalitbang Kota Palangka Raya di masa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah dan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Secara umum, isu-isu yang menjadi landasan dalam perumusan strategi dalam penyusunan program dan kegiatan pada Tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan integrasi, sinkronisasi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah;
- b. Meningkatkan monitoring dan evaluasi dalam rangka menjamin keselarasan antara perencanaan dan implementasi pelaksanaan program belum optimal;
- c. Meningkatkan analisis dan kajian dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah;
- d. Meningkatkan ketersediaan data yang aktual, valid dan mudah diakses;
- e. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur dan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Palangka Raya.

1.6. Sistematika Penulisan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya ini berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun sistematika penyusunan LKIP Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2023 sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

IKHTISAR EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi

- 1.3. Sumber Daya Manusia
- 1.4. Sarana dan Prasarana
- 1.5. Isu Strategis
- 1.6. Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1. Perencanaan Strategis
- 2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)
- 2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)
- 2.4. Rencana Aksi
- 2.4. Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- A. Capaian Indikator Kinerja
 1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini
 2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir
 3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD
 4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional
 5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan
- B. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
- C. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Atau Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja
- D. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Rencana Strategis Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 3 (tahun) tahun yang berpedoman kepada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan bersifat indikatif. Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya memuat tujuan, sasaran, strategi dan kebijakan serta program dan kegiatan indikatif sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sangat diperlukan adanya Rencana Strategis untuk masing-masing Perangkat Daerah. Bappedalitbang Kota Palangka Raya adalah salah satu Perangkat Daerah yang menangani Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan yang memiliki kewajiban untuk menyusun Rencana Strategis. Keberadaan Bappedalitbang Kota Palangka Raya menjadi sangat penting dalam mensukseskan Pembangunan Daerah, terkait dengan tugas dan fungsinya dalam bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan. Pembangunan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan Renstra Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026 bertujuan “Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah”.

Dokumen Renstra Perangkat Daerah harus selaras dengan dokumen perencanaan lain yang lebih bersifat makro dengan tujuan agar Program dan Kegiatan Perangkat Daerah selaras dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah sebagaimana tertuang dalam RPD Kota Palangka Raya Tahun 2024-2026, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah selaras dengan arah kebijakan Pemerintah Provinsi, arah kebijakan pembangunan Pemerintah Daerah dan arah kebijakan Pemerintah Provinsi sinkron dengan arah kebijakan pembangunan Pemerintah Pusat.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi : Terwujudnya Kota Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa Dan Wisata Yang Berkualitas, Tertata Dan Berwawasan Lingkungan, Menuju Masyarakat Sejahtera, Sesuai Falsafah Budaya Betang			
Misi : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Yang Berdisiplin Tinggi, Profesional, Bersih dan Berwibawa Serta Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	1. Meningkatkan keselarasan perencanaan daerah 2. Meningkatkan kualitas perencanaan OPD 3. Meningkatkan kualitas pengendalian perencanaan daerah 4. Meningkatkan kualitas hasil kelitbangan	Membangun Reformasi Birokrasi Melalui Peningkatan Delapan Area Perubahan Reformasi Birokrasi	Tahun 2024 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Untuk Menciptakan SDM Berkualitas dan Berdaya Saing, Meningkatkan Perekonomian Daerah, dan Pemantapan Tata Kelola Pemerintahan Menuju Masyarakat Sejahtera
			Tahun 2025 : Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Untuk Membangun Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik
			Tahun 2026 : Optimalisasi Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Ekonomi dan Sosial Menuju Palangka Raya Sebagai Kota Pendidikan, Jasa dan Wisata

2.2. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Dalam upaya memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata kelola pemerintahan yang baik, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.1.
Indikator Kinerja Utama Bappedalitbang Kota Palangka Raya

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPD
		Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	90%	90%	91%	91%	91%
2	Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA	90%	90%	91%	91%	91%
3	Persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target	90%	90%	91%	91%	91%
4	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	90%	90%	91%	91%	91%
5	Persentase hasil litbang yang termanfaatkan	100%	100%	100%	100%	100%

Tabel 2.2.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah OPD

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah		Indeks Kualitas Perencanaan	90%	90%	90%
	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	90%	91%	91%
		Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA	90%	91%	91%
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target	90%	91%	91%
	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	90%	91%	91%
	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase hasil litbang yang termanfaatkan	100%	100%	100%

2.3. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahunan Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.3.

Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Indikator Program	Target Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Anggaran (Rp)
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	90%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	93.679.800
				Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA					Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	16.442.200
			Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	90%				Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35 Laporan	60.958.000
			Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target	90%				Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	16.279.600
			Meningkatnya kualitas hasil kelitbang	Persentase hasil litbang yang termanfaatkan	100%				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.379.524.335

			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	7.274.211.335
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.022.921.000
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.375.000
									Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	93.679.800
									Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.379.524.335
									Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	7.274.211.335
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.022.921.000
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.375.000

									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	72.017.000
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.900.000
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7.900.000
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	306.131.043
									Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	66.093.750
									Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	75.787.293
									Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	164.250.000
									Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	535.561.009
									Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.621.800

									Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	278.059.700
									Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	25.131.800
									Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.779.600
									Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	177.968.109
									Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	594.180.795
									Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	7.000.000
									Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	348.456.995
									Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	238.723.800
									Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	619.476.000
									Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	342.450.000

									Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.600.000
									Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	228.425.000
									Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	7.992.000
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	16 Dokumen	2.315.758.468
									Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	1.800.952.700
									Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dokumen	136.501.063
									Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	23.096.900
									Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	38.105.000
									Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	81.524.900

									Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	235.577.905
									Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	1.846.726.750
									Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	1.094.000.000
									Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	66 Orang	752.726.750
									Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah	23 Laporan	673.691.751
									Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	236.630.263
									Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15 Laporan	437.061.488

									Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	150.550.950
									Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Dokumen	150.550.950
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90%	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17 Laporan/ Dokumen	1.577.727.622
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	319.101.071
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	386.803.750
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	82.430.862

									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	394.416.558
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	202.500.000
									Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	192.475.381
									Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	12 Laporan/ Dokumen	538.288.519
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	70.000.000

									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	380.126.906
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen	9.322.000
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Laporan	33.589.813
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Dokumen	43.200.000
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2.049.800
									Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	15 Laporan/ Dokumen	912.240.513

									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	233.111.550
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	117.413.763
									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	7.720.000
									Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	490.310.700
									Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	52.524.900

									Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	11.159.600
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	124.000.000
									Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen	124.000.000
									Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	105.100.000
									Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	105.100.000
									Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	207.900.000
									Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	115.959.100

									Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	91.940.900
									Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan/Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5 Laporan/Dokumen	506.343.600
									Penelitian, Pengembangan dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekrayaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	140.527.600
									Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	251.006.000
									Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	3 Laporan	114.810.000

2.4. Rencana Aksi

Sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra yang akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024 ditetapkan sebagai berikut :

Tabel 2.4.

Rencana Aksi Atas Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target	Program	Indikator Program	Target	Anggaran (Rp)	Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Output	Target	Target Realisasi				Penanggung Jawab
														I	II	III	IV	
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD	90%	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	10.536.443.982	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	93.679.800	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	20	50	80	100	Sekretaris
				Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA										13 Dokumen	20	50	80	
			Meningkatnya kualitas perencanaan OPD	Persentase OPD yang memiliki perencanaan yang baik	90%					Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	60.958.000	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35 Laporan	20	50	80	100	
				Persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target										5 Dokumen	20	50	80	
			Meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah	Persentase hasil litbang yang termanfaatkan	100%					Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	8.379.524.335	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	20	50	80	100	

			Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	7.274.211.335	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	20	50	80	100	
									Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1.022.921.000	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	20	50	80	100	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10.375.000	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	20	50	80	100	
									Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	72.017.000	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD	12 Laporan	20	50	80	100	
									Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	7.900.000	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	20	50	80	100	
									Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	7.900.000	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	20	50	80	100	
									Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	306.131.043	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	20	50	80	100	
									Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	66.093.750	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	20	50	80	100	
									Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	75.787.293	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	20	50	80	100	

										Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	164.250.000	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	20	50	80	100	
										Administrasi Umum Perangkat Daerah	535.561.009	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	20	50	80	100	
										Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	23.621.800	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	20	50	80	100	
										Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	278.059.700	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	20	50	80	100	
										Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	25.131.800	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	20	50	80	100	
										Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	30.779.600	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	20	50	80	100	
										Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	177.968.109	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	20	50	80	100	
										Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	594.180.795	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	20	50	80	100	
										Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7.000.000	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	20	50	80	100	
										Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	348.456.995	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	20	50	80	100	
										Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	238.723.800	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	20	50	80	100	

										Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	619.476.000	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan	100%	20	50	80	100	
										Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	342.450.000	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	20	50	80	100	
										Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	40.600.000	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	20	50	80	100	
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	228.425.000	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	20	50	80	100	
										Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	7.992.000	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	20	50	80	100	
						PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	4.986.727.919	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	2.315.758.468	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	16 Dokumen	20	50	80	100	Kabid PPEPD
										Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan , dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	1.800.952.700	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	20	50	80	100	

										Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	136.501.063	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dokumen	20	50	80	100	
										Pelaksanaan Konsultasi Publik	23.096.900	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	20	50	80	100	
										Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	38.105.000	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	20	50	80	100	
										Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota	81.524.900	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1 Berita Acara	20	50	80	100	
										Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	235.577.905	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	20	50	80	100	
										Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	1.846.726.750	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	20	50	80	100	
										Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	1.094.000.000	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	20	50	80	100	
										Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	752.726.750	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	66 Orang	20	50	80	100	

										Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	673.691.751	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah	23 Laporan	20	50	80	100	
										Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/ Kota	236.630.263	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	20	50	80	100	
										Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	437.061.488	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15 Laporan	20	50	80	100	
										Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	150.550.950	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	20	50	80	100	
										Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	150.550.950	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Dokumen	20	50	80	100	
						PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90%	3.028.256.654	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.577.727.622	Jumlah Laporan/ Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17 Laporan/ Dokumen	20	50	80	100	Kabid PPM
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	319.101.071	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	20	50	80	100	

										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	386.803.750	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	20	50	80	100	
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	82.430.862	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	20	50	80	100	
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	394.416.558	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	20	50	80	100	
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	202.500.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunan nya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	20	50	80	100	
										Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	192.475.381	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	20	50	80	100	
										Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	538.288.519	Jumlah Laporan/ Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	12 Laporan/ Dokumen	20	50	80	100	Kabid PSIK

										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	70.000.000	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	20	50	80	100	
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	380.126.906	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	20	50	80	100	
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	9.322.000	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen	20	50	80	100	
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	33.589.813	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Laporan	20	50	80	100	
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	43.200.000	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Dokumen	20	50	80	100	
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2.049.800	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	20	50	80	100	

										Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	912.240.513	Jumlah Laporan/ Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	15 Laporan/ Dokumen	20	50	80	100	Kabid PSIK
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	233.111.550	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	20	50	80	100	
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	117.413.763	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	20	50	80	100	
										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	7.720.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	20	50	80	100	
										Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	490.310.700	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	20	50	80	100	
										Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	52.524.900	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	20	50	80	100	

										Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	11.159.600	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	20	50	80	100	
						PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	943.343.600	Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	124.000.000	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	20	50	80	100	Kabid Litbang
										Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	124.000.000	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen	20	50	80	100	
										Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	105.100.000	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	20	50	80	100	
										Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	105.100.000	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	20	50	80	100	
										Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	207.900.000	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	20	50	80	100	
										Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	115.959.100	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	20	50	80	100	

										Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	91.940.900	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	20	50	80	100	
										Pengembangan Inovasi dan Teknologi	506.343.600	Jumlah Laporan/ Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5 Laporan/ Dokumen	20	50	80	100	
										Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	140.527.600	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	20	50	80	100	
										Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	251.006.000	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	20	50	80	100	
										Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	114.810.000	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	3 Laporan	20	50	80	100	

2.5. Perjanjian Kinerja

Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur, disusunlah perjanjian kinerja yang merupakan sebuah dokumen yang berisi penugasan dari pimpinan untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Perjanjian Kinerja sebagai tekad dan janji dari perencanaan kinerja tahunan sangat penting dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan target mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Perjanjian Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024 sebagai berikut :



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.
Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA

Selanjutnya disebut pihak pertama.

Nama : HERA NUGRAHAYU
Jabatan : Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palangka Raya, 3 Januari 2024

Pihak Kedua,

Pj. WALIKOTA PALANGKA RAYA,

Pihak Pertama,

KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA,



Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19750317 199903 1 005

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA	90%
2.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik	90%
3.	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target	90%
4.	Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbang	Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan	100%
5.	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB

No	Program		Anggaran	Keterangan
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp.	9.805.948.582	APBD
2.	Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	Rp.	4.102.357.919	APBD
3.	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Rp.	2.672.791.654	APBD
4.	Penelitian dan Pengembangan Daerah	Rp.	872.500.000	APBD
Total Anggaran		Rp.	17.453.598.155	

Palangka Raya, 3 Januari 2024

PJ. WALIKOTA PALANGKA RAYA,



KEPALA BADAN PERENCANAAN
 PEMBANGUNAN DAERAH, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN KOTA PALANGKA RAYA,



DI. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.
 Pembina Tingkat I (IV/b)
 NIP. 19750317 199903 1 005

Target Kinerja dan Anggaran dari Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5.

Sasaran, Indikator dan Target Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Tahun 2024

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Target Kinerja dan Anggaran Tahun 2024	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	NILAI SAKIP PERANGKAT DAERAH	BB	10.536.443.982
Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100%	93.679.800
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13 Dokumen	16.442.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35 Laporan	60.958.000
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5 Dokumen	16.279.600
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%	8.379.524.335
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47 Orang/ Bulan	7.274.211.335
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12 Dokumen	1.022.921.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	10.375.000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	72.017.000
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100%	7.900.000
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4 Laporan	7.900.000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%	306.131.043
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2 Paket	66.093.750
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4 Dokumen	75.787.293
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	16 Orang	164.250.000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	535.561.009

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4 Paket	23.621.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6 Paket	278.059.700
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12 Paket	25.131.800
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	12 Paket	30.779.600
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12 Laporan	177.968.109
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	594.180.795
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4 Laporan	7.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 Laporan	348.456.995
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	238.723.800
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Pemerintahan	100%	619.476.000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16 Unit	342.450.000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	40.600.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	228.425.000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1 Unit	7.992.000
PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	90%	4.986.727.919
Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	16 Dokumen	2.315.758.468
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3 Dokumen	1.800.952.700
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6 Dokumen	136.501.063
Pelaksanaan Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2 Berita Acara	23.096.900
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1 Berita Acara	38.105.000
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1 Berita Acara	81.524.900

Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/ Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3 Dokumen	235.577.905
Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4 Dokumen	1.846.726.750
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3 Dokumen	1.094.000.000
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	66 Orang	752.726.750
Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Perencanaan Pembangunan Daerah	23 Laporan	673.691.751
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8 Laporan	236.630.263
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15 Laporan	437.061.488
Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	2 Dokumen	150.550.950
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	2 Dokumen	150.550.950
PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH	Persentase Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD	90%	3.028.256.654
Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17 Laporan/ Dokumen	1.577.727.622
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	319.101.071
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4 Laporan	386.803.750
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1 Laporan	82.430.862
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4 Laporan	394.416.558

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	202.500.000
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4 Laporan	192.475.381
Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	12 Laporan/Dokumen	538.288.519
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	70.000.000
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Laporan	380.126.906
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2 Dokumen	9.322.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Laporan Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Laporan	33.589.813
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Dokumen	43.200.000
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2 Laporan	2.049.800
Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	15 Laporan/Dokumen	912.240.513
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2 Dokumen	233.111.550
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	117.413.763
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2 Laporan	7.720.000

Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3 Dokumen	490.310.700
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	52.524.900
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3 Laporan	11.159.600
PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100%	943.343.600
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1 Dokumen	124.000.000
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1 Dokumen	124.000.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1 Dokumen	105.100.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1 Dokumen	105.100.000
Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2 Dokumen	207.900.000
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1 Dokumen	115.959.100
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Daerah	1 Dokumen	91.940.900
Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Laporan/Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5 Laporan/Dokumen	506.343.600
Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1 Dokumen	140.527.600
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	1 Laporan	251.006.000
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang	3 Laporan	114.810.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja Pengukuran kinerja didasarkan pada Peraturan Menteri PAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran ini dilakukan dengan membandingkan realisasi capaian indikator kinerja dengan target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024.

Tujuan dari pengukuran kinerja adalah untuk menilai tingkat keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian sasaran strategis serta indikator kinerja yang telah ditetapkan. Pencapaian indikator kinerja dinilai menggunakan skala peringkat kinerja yang mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 mengenai Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Penilaian ini dapat dilihat lebih lanjut pada Tabel 3.1 berikut.

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Dalam penilaian kinerja tersebut, gradasi nilai (skala intensitas) kinerja suatu indikator dapat dimaknai sebagai berikut :

1. Hasil Sangat Tinggi dan Tinggi
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi target dan berada di atas persyaratan minimal kelulusan penilaian kinerja
2. Hasil Sedang
Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian telah memenuhi persyaratan minimal

3. Hasil Rendah dan Sangat Rendah

Gradasi ini menunjukkan pencapaian/realisasi kinerja capaian belum memenuhi/ masih di bawah persyaratan minimal pencapaian kinerja yang diharapkan.

E. Capaian Indikator Kinerja

A.1. Capaian Tujuan : Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	90%	100,20%	111,33%

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya menetapkan Tujuan Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur melalui Indeks Kualitas Perencanaan. Target yang ditetapkan untuk Tahun 2024 adalah 90%, terealisasi sebesar 100,20 melebihi target, sehingga tingkat capaian tujuan ini adalah 111,33%. Penilaian tersebut dilihat dari Keselasaran Daerah (100) + Kualitas Perencanaan OPD (100) + Kualitas Pengendalian Daerah (100,61) / 3 x 100 = 100,20.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Tujuan	Indikator Tujuan	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	103,82%	101,39%	111,33%

Terjadi perubahan tujuan dan indikator tujuan mulai Tahun 2022-2023 yang tertuang dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan daerah. Indikator keberhasilan tujuan ini diukur melalui indeks kualitas perencanaan. Berdasarkan data capaian dari tahun 2022 sebesar 103,82%, tahun 2023 sebesar 101,39% dan tahun 2024 mencapai 111,33%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan berhasil tercapai selama 3 tahun.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD

Tujuan	Indikator Tujuan	Target Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2024-2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	90%	100,20%	111,33%

Kualitas perencanaan daerah meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh indeks kualitas perencanaan tersebut. Target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ditetapkan sebesar 90%, dan pada Tahun 2024, realisasi telah melebihi target tersebut dengan capaian sebesar 111,33%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Tujuan	Indikator Tujuan	Standar Nasional	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Indeks Kualitas Perencanaan	95%	100,20%	105,47%

Peningkatan kualitas perencanaan daerah tercermin dalam indeks kualitas perencanaan. Sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan sebesar 95%, realisasi pada Tahun 2024 telah melebihi target tersebut dengan capaian 105,47%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan data yang ditampilkan, capaian kinerja dalam meningkatkan kualitas perencanaan daerah telah berhasil mencapai 111,33% Berikut adalah analisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut :

a. Faktor Pendukung Keberhasilan

- Kebijakan dan Regulasi yang jelas
Implementasi kebijakan dan regulasi yang kuat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Digitalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi
- Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah serta Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi urusan sehingga keselarasan dokumen perencanaan dapat dicapai
- Pendampingan secara berkala dan intens terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang Bappedalitbang dalam perumusan perencanaan yang akan dilaksanakan
- Dukungan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
Ketersediaan perangkat kerja yang memadai serta tenaga teknis dan administrasi yang kompeten berkontribusi dalam pencapaian target.

b. Potensi Tantangan atau Hambatan yang Dapat Muncul

Meskipun capaian melebihi 100% telah berhasil diraih, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi agar capaian ini tetap dipertahankan :

- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) eror waktu menginput perencanaan dan penganggaran
- Masih belum terakomodirnya seluruh usulan permasalahan pembangunan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran akibat keterbatasan keuangan daerah
- Kurangnya dukungan Perangkat Daerah untuk mengusulkan tema/ judul penelitian yang terkait dengan isu strategis dan program unggulan Kepala Daerah

- Rekomendasi hasil penelitian tidak diimplementasikan oleh Perangkat Daerah secara maksimal
- c. Alternatif Solusi yang Dilakukan atau Dapat Diterapkan
- Meskipun capaian melebihi 100%, diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas perencanaan daerah telah berhasil. Berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan :
- Pengembangan aplikasi e-monev dengan menambahkan monitoring capaian kinerja triwulan
 - Pendampingan secara berkala dan intens terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang Bappedalitbang dalam perumusan perencanaan yang akan dilaksanakan
 - Mengoptimalkan upaya monitoring kepatuhan penginputan data kinerja pada aplikasi e-monev untuk memastikan setiap perangkat daerah menyampaikan progress capaian kerjanya sesuai waktu yang telah ditetapkan
 - Melaksanakan monitoring pelaksanaan rekomendasi hasil penelitian ke perangkat daerah

A.1.1. Capaian Sasaran : Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	90%	100%	111,11%
	Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA			

Peningkatan Keselarasan Perencanaan Daerah diukur melalui persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD dan persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 90% dan terealisasi 100% berhasil melebihi target dengan capaian sebesar 111,11%.

Sasaran tersebut diperoleh dari Jumlah Program/Kegiatan RKPD dibagi Jumlah Program/Kegiatan RPJMD x 100% serta Jumlah Program/Kegiatan RENJA dibagi Jumlah Program/Kegiatan RENSTRA x 100%. Berdasarkan konsistensi keselarasan perencanaan daerah pada Aplikasi SIPD.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	100%	100%	111,11%
	Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA			

Terjadi perubahan tujuan dan indikator tujuan mulai Tahun 2022-2023 yang tertuang dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya keselarasan perencanaan daerah. Indikator keberhasilan sasaran ini diukur melalui persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD dan persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA. Berdasarkan data capaian dari Tahun 2022-2023 sebesar 100%, dan Tahun 2024 mencapai 111,11%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan berhasil tercapai selama 3 tahun

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2024-2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	91%	100%	109,89%
	Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA			

Keselarasan perencanaan daerah meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD dan persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA. Target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ditetapkan sebesar 91%, dan pada Tahun 2024, realisasi telah melebihi target tersebut dengan capaian sebesar 109,89%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Sasaran	Standar Nasional	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD	95%	100%	105,26%
	Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA			

Peningkatan keselarasan perencanaan daerah sebagaimana ditunjukkan oleh Persentase RKPD yang Selaras dengan RPJMD dan Persentase RENJA yang Selaras dengan RENSTRA. Sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan sebesar 95%, realisasi pada Tahun 2024 telah melebihi target tersebut dengan capaian 105,26%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan data yang ditampilkan, capaian kinerja dalam meningkatkan kualitas perencanaan daerah telah berhasil mencapai 111,11% Berikut adalah analisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut :

a. Faktor Pendukung Keberhasilan

- Kebijakan dan Regulasi yang jelas
Implementasi kebijakan dan regulasi yang kuat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Digitalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi

- Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah serta Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi urusan sehingga keselarasan dokumen perencanaan dapat dicapai
 - Pendampingan secara berkala dan intens terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang Bappedalitbang dalam perumusan perencanaan yang akan dilaksanakan
 - Dukungan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
Ketersediaan perangkat kerja yang memadai serta tenaga teknis dan administrasi yang kompeten berkontribusi dalam pencapaian target.
- b. Potensi Tantangan atau Hambatan yang Dapat Muncul
- Meskipun capaian melebihi 100% telah berhasil diraih, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi agar capaian ini tetap dipertahankan :
- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) eror waktu menginput perencanaan dan penganggaran
 - Masih terbatasnya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
 - Masih belum terakomodirnya seluruh usulan permasalahan pembangunan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran akibat keterbatasan keuangan daerah
- c. Alternatif Solusi yang Dilakukan atau Dapat Diterapkan
- Meskipun capaian melebihi 100%, diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas perencanaan daerah telah berhasil. Berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan :
- Koordinasi dengan pemerintah pusat berkenaan pembangunan prioritas di daerah sehingga dapat dibiayai melalui alternatif pendanaan dari pemerintah pusat
 - Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bangda (Pusdatin) agar informasi yang berhubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi
 - Koordinasi lebih intens dengan Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi urusan/kewenangan sehingga keselarasan dokumen perencanaan dapat dicapai.

A.1.2. Capaian Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik	90	100	111,11

Peningkatan kualitas perencanaan OPD diukur melalui persentase OPD yang memiliki perencanaan baik terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 90% dan terealisasi 100% berhasil melebihi target dengan capaian sebesar 111,11%. Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD dengan indikator sasaran Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik terealisasi sebesar 100% melebihi target. Sasaran tersebut diperoleh dari Jumlah Program/ Kegiatan RENJA dibagi Jumlah Program/Kegiatan DPA x 100%. Berdasarkan konsistensi keselarasan perencanaan daerah pada Aplikasi SIPD.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik	100%	100%	111,11%

Terjadi perubahan tujuan dan indikator tujuan mulai Tahun 2022-2023 yang tertuang dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas perencanaan OPD. Indikator keberhasilan sasaran ini diukur melalui persentase OPD yang memiliki perencanaan baik. Berdasarkan data capaian dari Tahun 2022-2023 sebesar 100%, dan Tahun 2024 mencapai 111,11%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan berhasil tercapai selama 3 tahun.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2024-2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik	91%	100%	109,89%

Kualitas perencanaan OPD meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh persentase OPD yang memiliki perencanaan baik. Target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ditetapkan sebesar 91%, dan pada Tahun 2024, realisasi telah melebihi target tersebut dengan capaian sebesar 109,89%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Sasaran	Standar Nasional	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik	95%	100%	105,26%

Peningkatan kualitas perencanaan OPD sebagaimana ditunjukkan oleh persentase OPD yang memiliki perencanaan baik. Sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan sebesar 95%, realisasi pada Tahun 2024 telah melebihi target tersebut dengan capaian 105,26%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan data yang ditampilkan, capaian kinerja dalam meningkatkan kualitas perencanaan daerah telah berhasil mencapai 111,11% Berikut adalah analisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut :

a. Faktor Pendukung Keberhasilan

- Kebijakan dan Regulasi yang jelas

Implementasi kebijakan dan regulasi yang kuat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah

- Digitalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi

- Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah serta Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi urusan sehingga keselarasan dokumen perencanaan dapat dicapai

- Pendampingan secara berkala dan intens terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang Bappedalitbang dalam perumusan perencanaan yang akan dilaksanakan

b) Dukungan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia

Ketersediaan perangkat kerja yang memadai serta tenaga teknis dan administrasi yang kompeten berkontribusi dalam pencapaian target.

b. Potensi Tantangan atau Hambatan yang Dapat Muncul

Meskipun capaian melebihi 100% telah berhasil diraih, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi agar capaian ini tetap dipertahankan :

a) Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) eror waktu menginput perencanaan dan penganggaran

b) Masih terbatasnya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan

c) Masih belum terakomodirnya seluruh usulan permasalahan pembangunan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran akibat keterbatasan keuangan daerah

c. Alternatif Solusi yang Dilakukan atau Dapat Diterapkan

Meskipun capaian melebihi 100%, diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas perencanaan daerah telah berhasil. Berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan :

- Koordinasi dengan pemerintah pusat berkenaan pembangunan prioritas di daerah sehingga dapat dibiayai melalui alternatif pendanaan dari pemerintah pusat
- Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bangda (Pusdatin) agar informasi yang berhubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi
- Koordinasi dengan BPS Kota Palangka Raya terkait data pendukung pelaporan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi
- Koordinasi lebih intens dengan Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi urusan/kewenangan sehingga keselarasan dokumen perencanaan dapat dicapai.

A.1.3. Capaian Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target	90%	100,61%	111,79%

Peningkatan kualitas pengendalian perencanaan daerah diukur melalui persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 90% dan terealisasi 100,61% berhasil melebihi target dengan capaian sebesar 111,79%. Sasaran tersebut diperoleh dari Capaian Kinerja Program/Kegiatan Perangkat Daerah dibagi Target Program/Kegiatan Perangkat Daerah.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target	100%	100%	111,79

Terjadi perubahan tujuan dan indikator tujuan mulai Tahun 2022-2023 yang tertuang dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas pengendalian perencanaan daerah. Indikator keberhasilan sasaran ini diukur melalui persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target. Berdasarkan data capaian dari Tahun 2022-2023 sebesar 100%, dan Tahun 2024 mencapai 111,79%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan berhasil tercapai selama 3 tahun.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2024-2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target	91%	100,61%	110,56%

Kualitas pengendalian perencanaan daerah meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target. Target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ditetapkan sebesar 91%, dan pada Tahun 2024, realisasi telah melebihi target tersebut dengan capaian sebesar 110,56%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Sasaran	Standar Nasional	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target	96-100%	100,61%	100,61%

Peningkatan kualitas pengendalian perencanaan daerah sebagaimana ditunjukkan oleh persentase realisasi capaian kinerja yang sesuai atau melebihi target. Sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan sebesar 96-100%, realisasi pada Tahun 2024 telah melebihi target tersebut dengan capaian 100,61%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan data yang ditampilkan, capaian kinerja dalam meningkatkan kualitas perencanaan daerah telah berhasil mencapai 111,79% Berikut adalah analisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut :

a. Faktor Pendukung Keberhasilan

- Kebijakan dan Regulasi yang jelas
Implementasi kebijakan dan regulasi yang kuat dalam penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah
- Digitalisasi Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi
Proses perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan dilakukan melalui aplikasi yang terintegrasi
- Koordinasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Kepala Daerah serta Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi urusan sehingga keselarasan dokumen perencanaan dapat dicapai
- Pendampingan secara berkala dan intens terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang Bappedalitbang dalam perumusan perencanaan yang akan dilaksanakan

- Dukungan Infrastruktur dan Sumber Daya Manusia
Ketersediaan perangkat kerja yang memadai serta tenaga teknis dan administrasi yang kompeten berkontribusi dalam pencapaian target.
- b. Potensi Tantangan atau Hambatan yang Dapat Muncul
- Meskipun capaian melebihi 100% telah berhasil diraih, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi agar capaian ini tetap dipertahankan :
- Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) eror waktu menginput perencanaan dan penganggaran
 - Masih terbatasnya data dan informasi yang diperlukan dalam rangka mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan
 - Masih belum terakomodirnya seluruh usulan permasalahan pembangunan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran akibat keterbatasan keuangan daerah
- c. Alternatif Solusi yang Dilakukan atau Dapat Diterapkan
- Meskipun capaian melebihi 100%, diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas perencanaan daerah telah berhasil. Berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan :
- Koordinasi dengan pemerintah pusat berkenaan pembangunan prioritas di daerah sehingga dapat dibiayai melalui alternatif pendanaan dari pemerintah pusat
 - Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bangda (Pusdatin) agar informasi yang berhubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi
 - Koordinasi dengan BPS Kota Palangka Raya terkait data pendukung pelaporan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi
 - Koordinasi lebih intens dengan Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi urusan/kewenangan sehingga keselarasan dokumen perencanaan dapat dicapai.

A.1.4. Capaian Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan	100	100	100

Peningkatan kualitas hasil kelitbangan diukur melalui persentase hasil litbang yang termanfaatkan terhadap Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan. Pada Tahun 2024, target yang ditetapkan adalah 100% dan terealisasi 100% berhasil teralisasi sesuai target dengan capaian sebesar 100%. Sasaran tersebut diperoleh dari Jumlah kajian yang diterapkan oleh perangkat teknis / Jumlah kajian yang dilaksanakan.

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran	Indikator	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan	100	100	100

Terjadi perubahan tujuan dan indikator tujuan mulai Tahun 2022-2023 yang tertuang dalam Perubahan Kedua Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Kota Palangka Raya Tahun 2018-2023. Sasaran yang ingin dicapai adalah meningkatnya kualitas hasil kelitbangan. Indikator keberhasilan sasaran ini diukur melalui persentase hasil litbang yang termanfaatkan Berdasarkan data realisasi dari Tahun 2022 hingga 2024 secara konsisten mencapai 100% setiap tahunnya. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan berhasil dipertahankan selama 3 tahun berturut-turut.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2024-2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan	100	100	100

Kualitas hasil kelitbangan meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh persentase hasil litbang yang termanfaatkan. Target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ditetapkan sebesar 100%, dan pada Tahun 2024, realisasi sesuai target dengan capaian sebesar 100%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Sasaran	Standar Nasional	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	Persentase Hasil Litbang yang Termanfaatkan	100%	100%	100%

Peningkatan kualitas hasil kelitbangan sebagaimana ditunjukkan oleh persentase realisasi hasil litbang yang termanfaatkan. Sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi pada Tahun 2024 telah sesuai target dengan capaian 100%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Berdasarkan data yang ditampilkan, capaian kinerja dalam meningkatkan kualitas hasil kelitbangan telah berhasil mencapai 100%. Berikut adalah analisis faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut :

a. Faktor Pendukung Keberhasilan

- Tersusunnya dokumen hasil kajian/penelitian yang dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah
- Melakukan pemetaan kebutuhan kelitbang sehingga penelitian dan pengembangan yang dilakukan berdasarkan kebutuhan daerah dan bermanfaat bagi Organisasi Pemerintah Daerah Kota Palangka Raya
- Hasil Kelitbang untuk merumuskan kebijakan dan mendukung perencanaan Pembangunan daerah

b. Potensi Tantangan atau Hambatan yang Dapat Muncul

Meskipun capaian 100% telah berhasil diraih, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi agar capaian ini tetap dipertahankan :

- Kurangnya tenaga fungsional peneliti, sehingga penelitian dan pengembangan yang dilakukan masih dipihak ketigakan dengan lembaga riset Perguruan Tinggi
- Kurangnya dukungan Perangkat Daerah untuk mengusulkan tema/ judul penelitian yang terkait dengan isu strategis dan program unggulan Kepala Daerah
- Rekomendasi hasil penelitian tidak diimplementasikan oleh Perangkat Daerah secara maksimal.

c. Alternatif Solusi yang Dilakukan atau Dapat Diterapkan

Meskipun capaian telah 100%, diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas perencanaan daerah telah berhasil. Berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan :

- Pengadaan SDM peneliti dan riset yang kompeten dan handal di bidangnya
- Menyampaikan surat inovasi daerah ke Perangkat Daerah
- Optimalisasi fasilitasi pelaksanaan road map Sistem Inovasi Daerah (SIDa pada) rencana kerja Perangkat Daerah
- Koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyamakan persepsi mengenai pengimplementasian (tindak lanjut/ pengaplikasian) hasil kajian.

A.1.5. Capaian Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

1. Membandingkan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun Ini

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Tahun 2024	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Nomor 700/59/LHE-AKIP/INSP/VI/2024 Tanggal 19 Juni 2024 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya memperoleh nilai 75,38 atau predikat BB (Sangat Baik).

2. Membandingkan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian 2022	Capaian 2023	Capaian 2024
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%

Berdasarkan hasil evaluasi Nomor 700/37/LHE-AKIP/INSP/IV.b/2023 Tanggal 10 April 2023 Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya untuk Tahun 2022 memperoleh nilai 71,38 atau predikat BB (Sangat Baik), Tahun 2023 memperoleh nilai 74,75 atau predikat BB (Sangat Baik) dan Tahun 2024 memperoleh nilai 75,38 atau predikat BB (Sangat Baik). Dari penilaian tersebut, Bappedalitbang setiap tahun mengalami kenaikan Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

3. Membandingkan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Rencana Strategis OPD

Sasaran	Indikator Sasaran	Target Jangka Menengah (Renstra) Tahun 2024-2026	Realisasi Tahun 2024	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	BB	BB	100%

Akuntabilitas kinerja dan keuangan meningkat, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai SAKIP Perangkat Daerah. Target jangka menengah dalam Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2024-2026 ditetapkan sebesar BB, dan pada Tahun 2024, realisasi sesuai target dengan capaian sebesar 100%.

4. Membandingkan Realisasi Kinerja Tahun Ini Dengan Standar Nasional

Sasaran	Indikator Sasaran	Standar Nasional	Realisasi 2024	Capaian
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100%	75,38%	75,38%

Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan sebagaimana ditunjukkan oleh nilai SAKIP Perangkat Daerah. Sesuai dengan standar nasional yang ditetapkan sebesar 100%, realisasi pada Tahun 2024 baru tercapai 75,38%.

5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Secara umum, capaian kinerja atas indikator sasaran sudah termasuk dalam kategori berhasil karena persentase capaian BB. Tingkat keberhasilan yang cukup tinggi ini disebabkan optimalnya pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya selaku unsur perencanaan penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,

pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan didukung pemanfaatan aplikasi perencanaan, aplikasi monitoring dan evaluasi.

a. Faktor Pendukung Keberhasilan

- Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan kinerja yang dimulai dari reviu cascading hingga dokumen perencanaan yang meliputi Renstra, Renja, DPA dan Perjanjian Kinerja untuk memastikan bahwa rumusan sasaran dan indikator kinerja telah menggambarkan kondisi kinerja yang harus dicapai, serta target yang ditetapkan dapat dicapai, menantang dan realistis
- Menyusun profil indikator kinerja pada pedoman pengukuran kinerja
- Mempertahankan dan meningkatkan komitmen yang baik dalam manajemen kinerja.

b. Potensi Tantangan atau Hambatan yang Dapat Muncul

Meskipun capaian 100% telah berhasil diraih, ada beberapa tantangan yang perlu diantisipasi agar capaian ini tetap dipertahankan :

- Terdapat ketidakselarasan target kinerja pada beberapa sub kegiatan Tahun 2024 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran dengan dokumen perencanaan yang diperjanjikan
- Perlunya menambahkan profil indikator untuk memperjelas definisi operasional atas kinerja

c. Alternatif Solusi yang Dilakukan atau Dapat Diterapkan

Meskipun capaian telah 100%, diperlukan strategi yang berkelanjutan untuk mempertahankan serta meningkatkan kualitas perencanaan daerah telah berhasil. Berikut beberapa alternatif solusi yang dapat dilakukan :

- Meningkatkan komponen pengukuran dan capaian kinerja. Apabila ada capaian kinerja yang tidak tercapai, *akan* disampaikan reasoning/alasan dan data yang dapat dipertanggungjawaban, agar tidak mempengaruhi penilaian

KINERJA BIDANG YANG MENDUKUNG INDIKATOR KINERJA UTAMA

1. BIDANG PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu :



Forum Perangkat Daerah



Forum Pemetaan Pendataan Perencanaan



Desk Pra Rakordal



FGD Pembahasan RPJPD Palangka-Raya 2025-2045



Musrenbang Tingkat Kecamatan



Musrenbang RKPD Kota Palangka Raya



Konsultasi Rancangan Awal RPJPD Tahun 2025-2045



Rapat Koordinasi Kepala Bappeda

2. BIDANG PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN MANUSIA

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu :



Koordinasi Tim Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2024



Gerak Monitoring Stunting



Rakor Mapping dan Tagging Anggaran Stunting Tahun 2024



Konsolidasi Intervensi Percepatan Penurunan Kemiskinan Ekstern



Penandatanganan Komitmen Kemiskinan



Sosialisasi Rencana Penanggulangan Kemiskinan

3. BIDANG PEREKONOMIAN, SDA, INFRASTRUKTUR & KEWILAYAHAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024



Musrenbang CSR



Review Program Hibah Air Minum Dengan Pihak Kedutaan Besar Australia



Rakor Forum PKP Dengan Program KIPAT-GESIT yg dihadiri Perhimpunan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI)



Penyerahan Hewan Kurban Melalui Forum CSRTJSL



City Sanitation Summit (CSS)



Verifikasi & Sinkronisasi Rancangan Kegiatan Dana Bagi Hasil (DBH) Sawit Bidang Infrastruktur Jalan Tahun 2024

4. BIDANG PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2024 yaitu :



Rapat Koordinasi Kelitbang



Pemenang Lomba Inovasi



Buletin Litbang Tahun 2024



Laporan Kajian



Seminar Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

B. Analisis Atas Efisiensi dan Penggunaan Sumber Daya

Analisis efisiensi penggunaan anggaran dilakukan dengan membuat perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran dengan persentase penyerapan anggaran. Kriteria perbandingan yang digunakan dalam analisis efisiensi sebagai berikut :

1. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran
2. Tidak Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja tujuan atau sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja tujuan dan sasaran.

Tabel 3.2.

Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Dalam Pencapaian Tujuan dan Sasaran Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran Strategis	% Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Ket
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Daerah	Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah	111,11	4.313.036.168	4.278.632.807	99,20	112,00	Efisien
		Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD	111,11	3.028.256.654	2.855.266.337	94,29	117,84	Efisien
		Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah	111,79	673.691.751	664.226.044	98,59	113,38	Efisien
		Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan	100	943.343.600	871.488.456	92,38	108,25	Efisien
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	100	10.536.443.982	9.712.070.076	92,18	108,49	Efisien
TOTAL				19.494.772.155	18.381.683.720	94,29	111,99	

Hasil analisa efisiensi anggaran tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah : Efisiensi, sasaran mencapai 111%. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya konsistensi keselarasan perencanaan daerah pada Aplikasi SIPD.
2. Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD Efisiensi, sasaran mencapai 117,84% Faktor yang mempengaruhi meningkatnya konsistensi keselarasan perencanaan daerah pada Aplikasi SIPD.
3. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah Efisiensi, sasaran mencapai 113,38%. Faktor yang mempengaruhi meningkatnya realisasi capaian kinerja perangkat daerah serta melakukan melakukan desk perangkat daerah setiap triwulan.
4. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan Efisiensi, sasaran mencapai 108,25% Faktor yang mempengaruhi meningkatnya sosialisasi dan koordinasi dengan OPD terkait kegiatan penelitian dan pengembangan.
5. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Efisiensi, sasaran mencapai 108,49%. Faktor yang mempengaruhi mempertahankan dan meningkatkan komitmen yang baik dalam manajemen kinerja.

Evaluasi Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran

- Capaian kinerja rata-rata sangat tinggi, dengan sebagian besar indikator mencapai atau bahkan melebihi 100%. Ini menunjukkan bahwa sasaran berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan.
- Realisasi anggaran sebesar 94,29% dari anggaran yang dialokasikan, yang berarti terdapat penghematan dalam penggunaan anggaran tanpa mengurangi pencapaian sasaran strategis.
- Tingkat efisiensi sebesar 111,99% menunjukkan bahwa meskipun realisasi anggaran lebih rendah dari yang direncanakan, kinerja tetap optimal. Ini menandakan efektivitas penggunaan anggaran yang tinggi.

Analisis Efisiensi Anggaran

- Efektif dan efisien : Dengan capaian kinerja 100% atau lebih dan realisasi anggaran di bawah anggaran yang direncanakan, ini menunjukkan bahwa dana yang tersedia telah digunakan secara efisien tanpa terjadi pemborosan.

- Optimalisasi sumber daya : Kemampuan mencapai target tanpa menggunakan seluruh anggaran yang tersedia menunjukkan bahwa terdapat strategi pengelolaan anggaran yang baik, seperti pemanfaatan sumber daya yang lebih hemat dan tepat sasaran.
- Dampak positif : Efisiensi ini mengindikasikan bahwa program perencanaan, penelitian dan pengembangan dapat terus berjalan dengan biaya yang lebih terkendali, sehingga sisa anggaran yang tidak terpakai dapat dialokasikan untuk kebutuhan lain atau efisiensi keuangan di masa mendatang.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Kesimpulan : Penggunaan anggaran dalam program perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dapat dikategorikan sebagai efisien, dengan capaian kinerja maksimal dan penghematan anggaran tanpa mengurangi hasil.

Rekomendasi :

- Tetap mempertahankan strategi pengelolaan anggaran yang hemat dan tepat sasaran
- Melakukan analisis lebih lanjut terkait efektivitas setiap komponen dalam anggaran, agar efisiensi tetap terjaga di masa depan

Secara keseluruhan, tingkat efisiensi yang tercapai dalam pengelolaan anggaran ini menunjukkan keberhasilan dalam optimalisasi dana tanpa mengurangi kualitas perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan yang diberikan.

Faktor yang Mempengaruhi Efisiensi Anggaran

Efisiensi anggaran dalam program perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkaitan dengan perencanaan, pengelolaan, dan pelaksanaan anggaran. Berikut adalah beberapa faktor utama yang mempengaruhi efisiensi anggaran tersebut :

1. Perencanaan Anggaran yang Akurat
 - Penyusunan anggaran yang berdasarkan kebutuhan riil dan data historis membantu menghindari pemborosan atau kekurangan dana
 - Identifikasi prioritas program secara tepat dapat memastikan alokasi anggaran digunakan sesuai dengan target yang ingin dicapai
2. Pengelolaan dan Pengawasan yang Ketat
 - Pengawasan yang efektif dalam penggunaan anggaran dapat mencegah kebocoran dana atau penggunaan yang tidak tepat.

- Monitoring dan evaluasi secara berkala memungkinkan perbaikan strategi dalam pengeluaran anggaran.
- 3. Optimalisasi Sumber Daya

Ketersediaan perangkat kerja yang memadai serta tenaga teknis dan administrasi yang kompeten berkontribusi dalam pencapaian target.
- 4. Efektivitas Pelaksanaan Program
 - Implementasi program yang tepat waktu dan sesuai dengan perencanaan awal dapat menghindari pengeluaran tambahan akibat keterlambatan atau perubahan strategi yang mendadak
 - Koordinasi yang baik antar unit kerja atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memastikan tidak adanya duplikasi anggaran dalam pelaksanaan program yang sama.
- 5. Pemanfaatan Teknologi dan Digitalisasi

Sistem informasi yang terintegrasi memungkinkan proses pelayanan lebih cepat dan efisien, sehingga menghemat anggaran operasional.
- 6. Transparansi dan Akuntabilitas
 - Pelaporan keuangan yang terbuka dan transparan mendorong penggunaan anggaran yang bertanggung jawab dan sesuai dengan regulasi
 - Sistem akuntabilitas yang baik memastikan setiap penggunaan dana dapat dipertanggungjawabkan, sehingga meminimalkan risiko inefisiensi atau penyalahgunaan anggaran.
- 7. Efisiensi dalam Pengadaan Barang dan Jasa
 - Proses pengadaan yang kompetitif dan sesuai standar (melalui e-katalog atau sistem tender yang transparan) dapat mengurangi biaya yang tidak perlu
 - Pengelolaan aset yang baik memastikan tidak ada pengeluaran berlebih untuk pengadaan barang yang tidak mendesak.

Efisiensi anggaran dipengaruhi oleh kombinasi perencanaan yang baik, pengelolaan yang ketat, optimalisasi sumber daya, digitalisasi, serta transparansi dalam pelaksanaannya. Dengan memastikan faktor-faktor ini berjalan dengan optimal dan efisiensi anggaran dapat terus ditingkatkan.

Tabel 3.3.
Penghitungan Efisiensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Uraian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	% Realisasi Anggaran	% Tingkat Efisiensi	Ket
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota								
Indikator Program Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	99,57	99,57	10.536.443.982	9.712.070.076	92,18	108,02	Efisien
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Indikator Kegiatan Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100,00	93.679.800	92.956.686	99,23	100,78	Efisien
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	13	100,00	16.442.200	16.442.200	100,00	100,00	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35	35	100,00	60.958.000	60.235.186	98,81	101,20	Efisien
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100,00	16.279.600	16.279.600	100,00	100,00	Efisien
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
Indikator Kegiatan Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100,00	8.379.524.335	7.857.042.981	93,76	106,65	Efisien
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	47	100,00	7.274.211.335	6.931.010.239	95,28	104,95	Efisien

Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00	1.022.921.000	846.045.462	82,71	120,91	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00	10.375.000	10.365.300	99,91	100,09	Efisien
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100,00	72.017.000	69.621.980	96,67	103,44	Efisien
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah								
Indikator Kegiatan Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100,00	7.900.000	7.819.400	98,98	101,03	Efisien
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100,00	7.900.000	7.819.400	98,98	101,03	Efisien
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah								
Indikator Kegiatan Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100,00	306.131.043	236.663.488	77,31	129,35	Efisien
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya								

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	2	100,00	66.093.750	63.530.000	96,12	104,04	Efisien
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	4	100,00	75.787.293	74.879.488	98,80	101,21	Efisien
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	18	100,00	164.250.000	98.254.000	59,82	167,17	Efisien
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah								
Indikator Kegiatan Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100,00	535.561.009	508.810.256	95,01	105,26	Efisien
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	100,00	23.621.800	23.621.800	100,00	100,00	Efisien
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	100,00	278.059.700	277.787.600	99,90	100,10	Efisien
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	100,00	25.131.800	25.131.800	100,00	100,00	Efisien
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100,00	30.779.600	18.044.000	58,62	170,58	Efisien
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00	177.968.109	164.225.056	92,28	108,37	Efisien

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Indikator Kegiatan Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100,00	177.968.109	164.225.056	92,28	108,37	Efisien
Penyediaan Jasa Surat Menyurat								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	100,00	7.000.000	7.000.000	100,00	100,00	Efisien
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	11	91,67	348.456.995	182.123.427	52,27	175,39	Efisien
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	238.723.800	220.038.100	92,17	108,49	Efisien
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								
Indikator Kegiatan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100,00	619.476.000	599.615.738	96,79	103,31	Efisien
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16	16	100,00	342.450.000	329.204.400	96,13	104,02	Efisien
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	100,00	40.600.000	39.480.000	97,24	102,84	Efisien
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya								

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100,00	228.425.000	227.464.000	99,58	100,42	Efisien
Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	1	1	100,00	7.992.000	3.467.338	43,39	230,49	Efisien
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah								
Indikator Program Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	90	100,30	111,44	4.986.727.919	4.942.858.851	99,12	112,43	Efisien
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan								
Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	16	16	100,00	2.315.758.468	2.298.236.566	99,24	100,76	Efisien
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kebijakan Lainnya								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3	3	100,00	1.800.952.700	1.795.007.714	99,67	100,33	Efisien
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6	6	100,00	136.501.063	129.288.662	94,72	105,58	Efisien
Pelaksanaan Konsultasi Publik								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	2	100,00	23.096.900	22.685.650	98,22	101,81	Efisien
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah								

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	100,00	38.105.000	35.788.750	93,92	106,47	Efisien
Kegiatan Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/ Kota	1	1	100,00	81.524.900	80.289.525	98,48	101,54	Efisien
Kegiatan Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3	3	100,00	235.577.905	235.176.265	99,83	100,17	Efisien
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4	100,00	1.846.726.750	1.830.490.743	99,12	100,89	Efisien
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	3	100,00	1.094.000.000	1.092.039.597	99,82	100,18	Efisien
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	66	66	100,00	752.726.750	738.451.146	98,10	101,93	Efisien
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah								
Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	23	23	100,00	673.691.751	664.226.044	98,59	101,43	Efisien
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota								

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8	8	100,00	236.630.263	234.839.244	99,24	100,76	Efisien
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15	15	100,00	437.061.488	429.386.800	98,24	101,79	Efisien
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah								
Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	1	1	100,00	150.550.950	149.905.498	99,57	100,43	Efisien
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	1	100,00	150.550.950	149.905.498	99,57	100,43	Efisien
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah								
Indikator Program Persentase Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	90	100	111,11	3.028.256.654	2.855.266.337	94,29	117,84	Efisien
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia								
Indikator Kegiatan Jumlah Laporan/ Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17	17	100,00	1.577.727.622	1.532.060.565	97,11	102,98	Efisien
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100,00	319.101.071	311.919.929	97,75	102,30	Efisien

Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	4	100,00	386.803.750	384.133.568	99,31	100,70	Efisien
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	100,00	82.430.862	79.863.334	96,89	103,21	Efisien
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4	4	100,00	394.416.558	368.423.760	93,41	107,06	Efisien
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100,00	202.500.000	200.247.928	98,89	101,12	Efisien
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/ Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	4	100,00	192.475.381	187.472.046	97,40	102,67	Efisien
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)								

Indikator Kegiatan Jumlah Laporan/ Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	12	12	100,00	538.288.519	484.370.306	89,98	111,13	Efisien
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100,00	70.000.000	38.815.300	55,45	180,34	Efisien
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	2	100,00	380.126.906	367.291.668	96,62	103,49	Efisien
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	2	100,00	9.322.000	6.137.000	65,83	151,90	Efisien
Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100,00	33.589.813	30.934.438	92,09	108,58	Efisien
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	2	100,00	43.200.000	40.109.900	92,85	107,70	Efisien

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	2	100,00	2.049.800	1.082.000	52,79	189,45	Efisien
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan								
Indikator Kegiatan Jumlah Laporan/ Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	15	15	100,00	912.240.513	838.835.466	91,95	108,75	Efisien
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100,00	233.111.550	203.311.082	87,22	114,66	Efisien
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	2	100,00	117.413.763	88.751.804	75,59	132,29	Efisien
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	2	100,00	7.720.000	7.675.000	99,42	100,59	Efisien
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)								

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	100,00	490.310.700	475.871.544	97,06	103,03	Efisien
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	3	100,00	52.524.900	52.068.036	99,13	100,88	Efisien
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	3	100,00	11.159.600	11.158.000	99,99	100,01	Efisien
Program Penelitian dan Pengembangan								
Indikator Program Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	100	100,00	943.343.600	871.488.456	92,38	108,25	Efisien
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan								
Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	1	100,00	124.000.000	106.223.348	85,66	116,74	Efisien
Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	1	100,00	124.000.000	106.223.348	85,66	116,74	Efisien
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial & Kependudukan								

Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	1	100,00	105.100.000	105.037.354	99,94	100,06	Efisien
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	1	100,00	105.100.000	105.037.354	99,94	100,06	Efisien
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan								
Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2	2	100,00	207.900.000	206.055.500	99,11	100,90	Efisien
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	100,00	115.959.100	115.571.300	99,67	100,34	Efisien
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Daerah	1	1	100,00	91.940.900	90.484.200	98,42	101,61	Efisien
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi								
Indikator Kegiatan Jumlah Laporan/ Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5	5	100,00	506.343.600	454.172.254	89,70	111,49	Efisien
Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi								

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	100,00	140.527.600	119.007.112	84,69	118,08	Efisien
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100,00	251.006.000	227.784.702	90,75	110,19	Efisien
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan								
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3	3	100,00	114.810.000	107.380.440	93,53	106,92	
TOTAL				19.494.772.155	18.381.683.720	94,29	111,69	

C. Analisa Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya melaksanakan 4 Program dengan 18 Kegiatan dan 59 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran senilai Rp. 19.494.772.155.

1. Efisiensi Program dan Kegiatan

Seluruh program dan kegiatan memiliki tingkat efisiensi yang tinggi dengan realisasi anggaran yang mendekati atau di bawah anggaran yang dialokasikan. Beberapa temuan utama :

- Seluruh indikator program dan kegiatan mencapai 100% target kinerja
- Tingkat efisiensi rata-rata lebih dari 100%, menunjukkan bahwa program dan kegiatan dilaksanakan dengan penggunaan anggaran yang lebih rendah dibandingkan alokasi awal.

2. Realisasi Anggaran

- Total realisasi anggaran mencapai lebih dari 90% pada sebagian besar kegiatan, menunjukkan perencanaan yang baik dalam pengalokasian anggaran
- Kegiatan yang memiliki realisasi anggaran yang lebih rendah dari 80%, yaitu Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah (77,31%). Hal ini disebabkan oleh efisiensi tinggi atau pengurangan kebutuhan belanja
- Program dengan alokasi anggaran besar seperti Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN memiliki realisasi sebesar 95,28%, mencerminkan efisiensi dalam pembayaran gaji dan tunjangan.

3. Faktor yang Menunjang Keberhasilan

- Perencanaan yang Matang : Perencanaan anggaran dan kegiatan dilakukan dengan baik sehingga realisasi hampir selalu mendekati 100%.
- Efisiensi Pelaksanaan : Tingkat efisiensi yang tinggi menunjukkan bahwa kegiatan dilakukan dengan biaya yang lebih rendah dari anggaran awal

- Pengawasan dan Evaluasi yang Baik : Persentase tindak lanjut terhadap hasil rekomendasi pengawasan mencapai 100%, menandakan efektivitas dalam pelaksanaan dan pemantauan kegiatan
- Penggunaan Teknologi dan Digitalisasi: Implementasi sistem digital dalam administrasi kemungkinan besar meningkatkan efisiensi pelaksanaan kegiatan.

4. Faktor Penghambat atau Penyebab Ketidakefisienan

- Penganggaran yang Berlebihan : Ada 1 kegiatan menunjukkan tingkat efisiensi yang terlalu tinggi (>200%), yang dapat mengindikasikan adanya over-budgeting
- Realisasi Anggaran yang Tidak Maksimal : Kegiatan seperti Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik memiliki realisasi anggaran hanya 52,27%, yang bisa menunjukkan adanya kendala dalam pelaksanaan atau penghematan yang tidak direncanakan
- Kegiatan yang Tidak Memerlukan Biaya Besar: Beberapa kegiatan mungkin bisa dilaksanakan dengan sumber daya yang lebih hemat dari yang diperkirakan dalam penganggaran.

Berdasarkan analisis efisiensi program dan kegiatan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa meskipun terdapat pencapaian dalam beberapa indikator kinerja, masih terdapat peluang untuk meningkatkan efektivitas dalam alokasi sumber daya dan optimalisasi anggaran. Beberapa kegiatan menunjukkan efisiensi yang tinggi, namun ada pula yang memerlukan penyesuaian agar lebih selaras dengan tujuan strategis organisasi. Oleh karena itu, direkomendasikan untuk meningkatkan perencanaan berbasis data, melakukan evaluasi berkala.

C.1. Sasaran Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah

Sasaran ini didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan, Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah, Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah dan Sub Kegiatan Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah, Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya, Pelaksanaan Konsultasi Publik, Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah, Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota, Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota, Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah, Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD dan Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah.

C.1.1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Capaian kinerja program 111,44% dan realisasi anggaran Rp. 4.942.858.851 (99,12%) dengan tingkat efisiensi 112,43%. Faktor yang menyebabkan kegagalan program dalam mencapai indikator Sasaran 1 yaitu masih belum terakomodirnya seluruh usulan permasalahan pembangunan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran akibat keterbatasan keuangan daerah dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) eror waktu menginput perencanaan dan penganggaran serta rendahnya pemahaman SDM terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan. Faktor keberhasilan program dalam mencapai indikator Sasaran 1 yaitu adanya dukungan dari pemerintah pusat berkenaan pembangunan prioritas di daerah sehingga dapat dibiayai melalui alternatif pendanaan dari pemerintah pusat dan koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri Dirjen Bangda (Pusdatin) agar informasi yang berhubungan dengan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan, pengendalian dan evaluasi. Adapun untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program 1 adalah :

a. Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 2.298.236.566 (99,24%) dengan tingkat efisiensi 100,76%, didukung 6 sub kegiatan yaitu :

1. Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kebijakan Lainnya
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 1.795.007.714 (99,67%) dengan tingkat efisiensi 100,33%
2. Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 129.288.662 (94,72%) dengan tingkat efisiensi 105,58%
3. Pelaksanaan Konsultasi Publik
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 22.685.650 (98,22%) dengan tingkat efisiensi 101,81%
4. Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 35.788.750 (93,92%) dengan tingkat efisiensi 106,47%
5. Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 80.289.525 (98,48%) dengan tingkat efisiensi 101,54%
6. Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 235.176.265 (99,83%) dengan tingkat efisiensi 100,17%.

b. Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 1.830.490.743 (99,12%) dengan tingkat efisiensi 100,89%, didukung 2 sub kegiatan yaitu :

1. Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 1.092.039.597 (99,82%) dengan tingkat efisiensi 100,18%
2. Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 738451146 (98,10%) dengan tingkat efisiensi 101,93%.

- c. Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 149.905.498 (99,57%) dengan tingkat efisiensi 100,43%, didukung 1 sub kegiatan yaitu :
1. Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 149.905.498 (99,57%) dengan tingkat efisiensi 100,43%

C.2. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD

Sasaran ini didukung oleh Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah; Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam), Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan 18 Sub Kegiatan. Adapun untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program 2 adalah :

C.2.1. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

Capaian kinerja program 111,11% dan realisasi anggaran Rp. 2.855.266.337 (94,29%) dengan tingkat efisiensi 117,84%. Faktor yang menyebabkan kegagalan program dalam mencapai indikator Sasaran 2 yaitu masih belum terakomodirnya seluruh usulan permasalahan pembangunan dari masyarakat dan pokok-pokok pikiran akibat keterbatasan keuangan daerah dan Aplikasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD RI) eror waktu menginput perencanaan dan penganggaran serta rendahnya pemahaman SDM terkait Penyusunan Dokumen Perencanaan. Faktor keberhasilan program dalam mencapai indikator Sasaran 2 yaitu adanya dukungan dari pemerintah pusat berkenaan pembangunan prioritas di daerah sehingga dapat dibiayai melalui alternatif pendanaan dari pemerintah pusat dan Koordinasi lebih intens dengan Perangkat Daerah dalam rangka sinkronisasi urusan/kewenangan sehingga keselarasan dokumen perencanaan dapat dicapai. Adapun untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program 2 adalah :

- a. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 1.532.060.565 (97,11%) dengan tingkat efisiensi 102,98%, didukung 6 sub kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 311.919.929 (97,75%) dengan tingkat efisiensi 102,30%
 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 384.133.568 (99,31%) dengan tingkat efisiensi 100,70%
 3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 79.863.334 (96,89%) dengan tingkat efisiensi 103,21%
 4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 368.423.760 (93,41%) dengan tingkat efisiensi 107,06%
 5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 200.247.928 (98,89%) dengan tingkat efisiensi 101,12%
 6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 187.472.046 (97,40%) dengan tingkat efisiensi 102,67%
- b. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam). Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 484.370.306 (89,98%) dengan tingkat efisiensi 111,13%, didukung 6 sub kegiatan yaitu :
1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 38.815.300 (55,45%) dengan tingkat efisiensi 180,34%
 2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Capaian kinerja sub kegiatan 100%

dan realisasi anggaran Rp. 367.291.668 (96,62%) dengan tingkat efisiensi 103,49%

3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 6.137.000 (65,83%) dengan tingkat efisiensi 151,90%
4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 30.934.438 (92,09%) dengan tingkat efisiensi 108,58%
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 40.109.900 (92,85%) dengan tingkat efisiensi 107,70%
6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 1.082.000 (52,79%) dengan tingkat efisiensi 189,45%.

- c. Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 838.835.466 (91,95%) dengan tingkat efisiensi 108,75%, didukung 6 sub kegiatan yaitu :

1. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 203.311.082 (87,22%) dengan tingkat efisiensi 114,66%
2. Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 88.751.804 (75,59%) dengan tingkat efisiensi 132,29%
3. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp 7.675.000 (99,42%) dengan tingkat efisiensi 100,59%

4. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan
Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 475.871.544 (97,06%) dengan tingkat efisiensi 103,03%
5. Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD). Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 52.068.036 (99,13%) dengan tingkat efisiensi 100,88%
6. Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 11.158.000 (99,99%) dengan tingkat efisiensi 100,01%.

C.3. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah

Sasaran ini didukung oleh Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi; Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah; serta Sub Kegiatan Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota dan Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah.

C.3.1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi

Capaian kinerja program 111,44% dan realisasi anggaran Rp. 4.942.858.851 (99,12%) dengan tingkat efisiensi 112,43%. Faktor yang menyebabkan kegagalan program dalam mencapai indikator Sasaran 3 yaitu Perangkat Daerah yang belum menyesuaikan target sub kegiatan yang digunakan pada penyusunan Evaluasi Triwulan RKPD dan belum maksimalnya monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh bidang-bidang Bappedalitbang terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang dalam penyusunan perencanaan. Faktor keberhasilan program dalam mencapai indikator Sasaran 3 yaitu menginventarisir target kinerja yang telah tercapai untuk mengetahui kesesuaian kegiatan yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah serta melakukan pendampingan secara berkala dan intens terhadap Perangkat Daerah dibawah koordinasi masing-masing bidang Bappedalitbang dalam perumusan perencanaan yang akan dilaksanakan. Adapun untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program adalah :

- a. Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 664.226.044 (98,59%) dengan tingkat efisiensi 101,43, didukung 2 sub kegiatan yaitu :
1. Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 234.839.244 (99,24%) dengan tingkat efisiensi 100,76%
 2. Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 429.386.800 (98,24%) dengan tingkat efisiensi 101,79%.

C.4. Sasaran : Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan

Sasaran ini didukung oleh Program Penelitian dan Pengembangan; Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan, Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi; serta 7 Sub Kegiatan.

C.4.1. Program Penelitian dan Pengembangan

Capaian kinerja program 100% dan realisasi anggaran Rp. 871.488.456 (92,38%) dengan tingkat efisiensi 108,25%. Faktor yang menyebabkan kegagalan program dalam mencapai indikator Sasaran 4 yaitu kurangnya dukungan Perangkat Daerah untuk mengusulkan tema/ judul penelitian yang terkait dengan isu strategis dan program unggulan Kepala Daerah dan rekomendasi hasil penelitian tidak diimplementasikan oleh Perangkat Daerah secara maksimal. Faktor keberhasilan program dalam mencapai indikator Sasaran 3 yaitu meningkatkan sosialisasi dan koordinasi dengan SKPD terkait kegiatan penelitian dan pengembangan serta koordinasi dengan Perangkat Daerah terkait untuk menyamakan persepsi mengenai pengimplementasian (tindak lanjut/ pengaplikasian) hasil kajian. Adapun untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program adalah :

- a. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 106.223.348 (85,66%) dengan tingkat efisiensi 111,74. Didukung Sub Kegiatan Fasilitas, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum dengan capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran 106.223.348 (85,66%) dengan tingkat efisiensi 111,74%.
- b. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 105.037.354 (99,94%) dengan tingkat efisiensi 100,06. Didukung Sub Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial dengan capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 105.037.354 (99,94%) dengan tingkat efisiensi 100,06%.
- c. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 206.055.500 (99,11%) dengan tingkat efisiensi 100,90, didukung 2 sub kegiatan yaitu :
 1. Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 115.571.300 (99,67%) dengan tingkat efisiensi 100,34%
 2. Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 90.484.200 (98,42%) dengan tingkat efisiensi 101,61%.
- d. Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 454.172.254 (89,70%) dengan tingkat efisiensi 111,49 didukung 3 sub kegiatan yaitu :
 1. Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 119.007.112 (84,69%) dengan tingkat efisiensi 118,08%
 2. Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 227.784.702 (90,75%) dengan tingkat efisiensi 110,19%
 3. Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbang. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp 107.380.440 (93,53%) dengan tingkat efisiensi 106,92%

C.5. Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan

Sasaran ini didukung oleh Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah, Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah, Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah; serta 23 Sub Kegiatan.

C.5.1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Capaian kinerja program 99,57% dan realisasi anggaran Rp. 9.712.070.076 (92,18%) dengan tingkat efisiensi 108,02%. Faktor yang mempengaruhi mempertahankan dan meningkatkan komitmen yang baik dalam manajemen kinerja. Adapun untuk kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung Program adalah :

- a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 92.956.686 (99,23%) dengan tingkat efisiensi 100,78%, didukung 3 sub kegiatan yaitu :
 1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 16.442.200 (100%) dengan tingkat efisiensi 100%
 2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 60.235.186 (98,81%) dengan tingkat efisiensi 101,20%
 3. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah . Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 16.279.600 (100%) dengan tingkat efisiensi 100%.
- b. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 7.857.042.981 (93,76%) dengan tingkat efisiensi 106,65%, didukung 4 sub kegiatan yaitu :
 1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 6.931.010.239 (95,28%) dengan tingkat efisiensi 104,95%

2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 846.045.462 (82,71%) dengan tingkat efisiensi 120,91%
 3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 10.365.300 (99,91%) dengan tingkat efisiensi 100,09%
 4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 69.621.980 (96,67%) dengan tingkat efisiensi 103,44%.
- c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 7.891.400 (98,98%) dengan tingkat efisiensi 101,03%. Didukung Sub Kegiatan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD dengan capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran 7.891.400 (98,98%) dengan tingkat efisiensi 101,03%.
- d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 236.663.488 (77,31%) dengan tingkat efisiensi 129,35%, didukung 3 sub kegiatan yaitu :
1. Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 63.530.000 (96,12%) dengan tingkat efisiensi 104,04%
 2. Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 74.879.488 (98,80%) dengan tingkat efisiensi 101,21%
 3. Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 98.254.000 (59,82%) dengan tingkat efisiensi 167,17%.
- e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 7.857.042.981 (93,76%) dengan tingkat efisiensi 106,65%, didukung 4 sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 508.810.256 (95,01%) dengan tingkat efisiensi 105,26%

2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 23.621.800 (100%) dengan tingkat efisiensi 100%
 3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 277.787.600 (99,90%) dengan tingkat efisiensi 100,10%
 4. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 25.131.800 (100%) dengan tingkat efisiensi 100%.
 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 164.225.056 (92,28%) dengan tingkat efisiensi 108,37%.
- f. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 164.225.056 (92,28%) dengan tingkat efisiensi 108,37%, didukung 3 sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 7.000.000 (100%) dengan tingkat efisiensi 100%
 2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik. Capaian kinerja sub kegiatan 91,67% dan realisasi anggaran Rp. 182.123.427 (100%) dengan tingkat efisiensi 175,39%
 3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 220.038.100 (92,17%) dengan tingkat efisiensi 108,49%.
- g. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Capaian kinerja kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 599.615.738 (96,79%) dengan tingkat efisiensi 103,31%, didukung 4 sub kegiatan yaitu :
1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 329.204.400 (96,13%) dengan tingkat efisiensi 104,02%

2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 39.480.000 (97,24%) dengan tingkat efisiensi 102,84%
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 227.464.000 (99,58%) dengan tingkat efisiensi 100,42%
4. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya. Capaian kinerja sub kegiatan 100% dan realisasi anggaran Rp. 3.467.338 (43,39%) dengan tingkat efisiensi 230,49%.

D. Realisasi Anggaran

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya pada Tahun 2024 memperoleh anggaran dari APBD sebesar Rp. 19.494.772.155. Dari total anggaran tersebut, realisasi belanja mencapai Rp.18.381.683.720 atau 94,29%, yang mencerminkan efektivitas tinggi dalam penggunaan anggaran. Efisiensi dalam pengelolaan anggaran juga tercermin dari tingkat efisiensi yang mencapai 111,99%, yang menunjukkan bahwa anggaran yang dialokasikan telah dimanfaatkan dengan optimal untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi. Berdasarkan Perjanjian Kinerja, realisasi anggaran ini digunakan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan strategis yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian target kinerja, antara lain :

1. Peningkatan Keselarasan Perencanaan Daerah dan Peningkatan Kualitas Perencanaan OPD
 - Capaian : Persentase RKPD yang selaras dengan RPJMD, Persentase RENJA yang selaras dengan RENSTRA dan Persentase OPD yang Memiliki Perencanaan Baik memperoleh nilai 111,11%, yang menunjukkan kinerja Sangat Tinggi
 - Dampak Realisasi Anggaran : meningkatnya kualitas perencanaan daerah.
2. Peningkatan Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah
 - Capaian : Persentase Realisasi Capaian Kinerja yang Sesuai atau Melebihi Target memperoleh nilai 111,79%, yang menunjukkan kinerja Sangat Tinggi

- Dampak Realisasi Anggaran : meningkatnya pencapaian target perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan pada RKPD.

Realisasi anggaran yang mencapai 94,29%% dari total pagu telah memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi anggaran yang tinggi juga menunjukkan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan output maksimal dengan alokasi anggaran yang tersedia.

Dalam hal meningkatkan kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya selaku unsur perencana penyelenggaraan pemerintahan yang melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah dan didukung pemanfaatan aplikasi perencanaan, aplikasi monitoring dan evaluasi.

Tabel 3.4.
Realisasi Anggaran Tahun 2024

Uraian	Target Kinerja	Realisasi	Persentase Capaian Kinerja	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota					
Indikator Program Nilai SAKIP Perangkat Daerah	100	99,57	99,57	10.536.443.982	9.712.070.076
Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Indikator Kegiatan Persentase Penyusunan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	100	100,00	93.679.800	92.956.686
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	13	13	100,00	16.442.200	16.442.200
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD					

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35	35	100,00	60.958.000	60.235.186
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	5	5	100,00	16.279.600	16.279.600
Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah					
Indikator Kegiatan Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	100,00	8.379.524.335	7.857.042.981
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	47	47	100,00	7.274.211.335	6.931.010.239
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	100,00	1.022.921.000	846.045.462
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	100,00	10.375.000	10.365.300
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	12	12	100,00	72.017.000	69.621.980
Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah					
Indikator Kegiatan Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	100	100	100,00	7.900.000	7.819.400

Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	4	100,00	7.900.000	7.819.400
Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah					
Indikator Kegiatan Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100	100	100,00	306.131.043	236.663.488
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	2	2	100,00	66.093.750	63.530.000
Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	4	4	100,00	75.787.293	74.879.488
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	18	18	100,00	164.250.000	98.254.000
Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah					
Indikator Kegiatan Persentase Administrasi Umum Perangkat Daerah	100	100	100,00	535.561.009	508.810.256
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	4	4	100,00	23.621.800	23.621.800
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	6	100,00	278.059.700	277.787.600
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	12	12	100,00	25.131.800	25.131.800

Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	12	100,00	30.779.600	18.044.000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	12	100,00	177.968.109	164.225.056
Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Indikator Kegiatan Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	12	12	100,00	177.968.109	164.225.056
Penyediaan Jasa Surat Menyurat					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	4	4	100,00	7.000.000	7.000.000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	11	91,67	348.456.995	182.123.427
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	100,00	238.723.800	220.038.100
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					
Indikator Kegiatan Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	100	100	100,00	619.476.000	599.615.738
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	16	16	100,00	342.450.000	329.204.400
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20	20	100,00	40.600.000	39.480.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00	228.425.000	227.464.000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	1	100,00	7.992.000	3.467.338
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah					
Indikator Program Persentase Kesesuaian Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	90	100,30	111,44	4.986.727.919	4.942.858.851
Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan					
Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pendanaan Pembangunan Daerah	16	16	100,00	2.315.758.468	2.298.236.566
Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah Kebijakan Lainnya					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/ RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik)	3	3	100,00	1.800.952.700	1.795.007.714
Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	6	6	100,00	136.501.063	129.288.662
Pelaksanaan Konsultasi Publik					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik	2	2	100,00	23.096.900	22.685.650
Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/ Lintas Perangkat Daerah					

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	1	1	100,00	38.105.000	35.788.750
Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/ Kota					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota	1	1	100,00	81.524.900	80.289.525
Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/ RPJMD/RKPD)	3	3	100,00	235.577.905	235.176.265
Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Analis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4	4	100,00	1.846.726.750	1.830.490.743
Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)	3	3	100,00	1.094.000.000	1.092.039.597
Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan SKPD					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi	66	66	100,00	752.726.750	738.451.146
Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah					
Indikator Kegiatan Jumlah Laporan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan	23	23	100,00	673.691.751	664.226.044
Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota					

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan	8	8	100,00	236.630.263	234.839.244
Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah	15	15	100,00	437.061.488	429.386.800
Kegiatan Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah					
Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah	1	1	100,00	150.550.950	149.905.498
Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola	1	1	100,00	150.550.950	149.905.498
Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah					
Indikator Program Persentase Konsistensi Program RPJMD ke Dalam RKPD	90	100	111,11	3.028.256.654	2.855.266.337
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia					
Indikator Kegiatan Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	17	17	100,00	1.577.727.622	1.532.060.565
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100,00	319.101.071	311.919.929
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	4	4	100,00	386.803.750	384.133.568
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	1	1	100,00	82.430.862	79.863.334
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan	4	4	100,00	394.416.558	368.423.760
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	q2	2	100,00	202.500.000	200.247.928
Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	4	4	100,00	192.475.381	187.472.046

Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)					
Indikator Kegiatan Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA	12	12	100,00	538.288.519	484.370.306
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100,00	70.000.000	38.815.300
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	2	100,00	380.126.906	367.291.668
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	2	2	100,00	9.322.000	6.137.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100,00	33.589.813	30.934.438
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	2	100,00	43.200.000	40.109.900
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	2	2	100,00	2.049.800	1.082.000
Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan					
Indikator Kegiatan Jumlah Laporan/Dokumen Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	15	15	100,00	912.240.513	838.835.466
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	2	2	100,00	233.111.550	203.311.082
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	2	100,00	117.413.763	88.751.804
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur					

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	2	2	100,00	7.720.000	7.675.000
Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	3	3	100,00	490.310.700	475.871.544
Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	3	100,00	52.524.900	52.068.036
Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	3	3	100,00	11.159.600	11.158.000
Program Penelitian dan Pengembangan					
Indikator Program Persentase Kajian Penelitian dan Pengembangan Daerah	100	100	100,00	943.343.600	871.488.456
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan					
Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	1	1	100,00	124.000.000	106.223.348

Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum	1	1	100,00	124.000.000	106.223.348
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan					
Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	1	1	100,00	105.100.000	105.037.354
Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	1	1	100,00	105.100.000	105.037.354
Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan					
Indikator Kegiatan Jumlah Dokumen Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	2	2	100,00	207.900.000	206.055.500
Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	1	1	100,00	115.959.100	115.571.300
Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Badan Usaha Milik Daerah	1	1	100,00	91.940.900	90.484.200
Kegiatan Pengembangan Inovasi dan Teknologi					
Indikator Kegiatan Jumlah Laporan/Dokumen Pengembangan Inovasi dan Teknologi	5	5	100,00	506.343.600	454.172.254
Penelitian, Pengembangan, dan Perekrayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi					

Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	1	1	100,00	140.527.600	119.007.112
Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	1	1	100,00	251.006.000	227.784.702
Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan					
Indikator Sub Kegiatan Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif	3	3	100,00	114.810.000	107.380.440
TOTAL				19.494.772.155	18.381.683.720

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya Tahun 2024 merupakan gambaran kinerja termasuk evaluasi dan analisis terhadap kinerja pencapaian sasaran dan kegiatan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan selama Tahun 2024. Secara umum capaian sasaran strategis tersebut telah menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik dengan capaian 100%.

Penyelenggaraan Program dan Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024 berdasarkan hasil analisis realisasi kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatnya Keselarasan Perencanaan Daerah capaian kinerja 111,11%.
- b. Meningkatnya Kualitas Perencanaan OPD capaian kinerja 111,11%.
- c. Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Daerah capaian kinerja 111,79%.
- d. Meningkatnya Kualitas Hasil Kelitbangan capaian kinerja 100%.
- e. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan capaian kinerja BB.
- f. Realisasi anggaran mencapai 94,29% dari total 19.494.772.155, yang menunjukkan penggunaan anggaran yang sangat optimal
- g. Tingkat efisiensi anggaran mencapai 111,99%, yang berarti Bappedalitbang Kota Palangka Raya mampu menjalankan seluruh program dan kegiatan dengan efisiensi tinggi, tanpa pemborosan sumber daya.

Keberhasilan pencapaian sasaran strategis Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya sangat bergantung atas optimalnya dalam menjalankan fungsi koordinasi, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan serta ditunjang dengan penggunaan aplikasi secara efektif. Untuk itu dibutuhkan komitmen tinggi serta kerjasama dari semua pihak demi terwujudnya tujuan dan sasaran yang sudah ditetapkan dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah.

4.2. Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bappedalitbang Kota Palangka Raya yang akan datang, kami melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

1. Penetapan sasaran dan target pembangunan daerah dilakukan melalui cascading RPJMD untuk memastikan kontribusi setiap program dan kegiatan terhadap pencapaian sasaran perangkat daerah, maka perlu penajaman kegiatan sehingga dapat berkontribusi terhadap sasaran OPD.
2. Melakukan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan yang lebih berkualitas.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan monitoring dan evaluasi capaian Perjanjian Kinerja.
4. Mengoptimalkan kebutuhan anggaran dan memantapkan perencanaan kebutuhan anggaran agar terdapat keseimbangan antara perencanaan dan realisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Kota Palangka Raya Tahun 2024 ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja, penyempurnaan dokumen perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan yang akan datang, serta penyempurnaan berbagai kebijakan yang diperlukan.

Palangka Raya, 24 Januari 2025

Kepala Bappedalitbang Kota Palangka Raya,



Dr. FAUZI RAHMAN, S.Sos., M.AP.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750317 199903 1 005